

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2016-2020

Rizki Sari Eka Putri¹; Agus Munandar²

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul^{1,2}

Email : rizki.suwarno11@gmail.com¹; agus.munandar@esaunggul.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020. Penggunaan analisa rasio seperti rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektifitas serta efisiensi pendapatan asli daerah, rasio belanja langsung serta belanja tidak langsung, dan rasio pertumbuhan merupakan alat pengkajian kinerja keuangan. Analisa statistik dalam studi ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil studi menemukan bahwa derajat desentralisasi Kota Malang berada pada kriteria sedang dengan jumlah PAD masih relatif kecil, tingkat kemandirian Kota Malang terletak di bawah 50% atau dalam kategori kecil, tingkat ketergantungan Kota Malang terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi, realisasi penerimaan PAD Kota Malang termasuk dalam kategori sangat efektif dengan disertai biaya pemerolehan PAD yang sangat efisien. Selain itu, perbandingan belanja langsung memperlihatkan rata-rata yang lebih besar sehingga tercermin bahwa Pemerintah Kota Malang lebih memprioritaskan pendanaannya untuk kepentingan masyarakat.

Kata kunci : kinerja keuangan; rasio keuangan; PAD

ABSTRACT

The research conducted with the aim to analyze financial capabilities of the Malang City Regional Government through the 2016-2020 Budget Realization Report. The use of ratio analysis such as decentralized degree ratio, financial independence ratio, effectiveness and efficiency ratio of local income, direct spending and indirect spending ratio, and growth ratio are tools of measure financial performance. Statistical analysis in this study uses descriptive quantitative methods. The results of the study found that the degree of decentralization of Malang City is on a moderate criteria with the number of local income still relatively small, the level of independence of Malang City is located below 50% or in a small category, the level of dependence of Malang City on central government transfers is still quite high, the realization of the receipt of local income Malang City is included in the category of very effective with the cost of obtaining local income very efficient. In addition, direct spending shows a greater average so that it is reflected that the Malang City Government prioritizes its funding for the benefit of the society.

Keywords : financial performance; financial ratio; local income

PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara umum menerangkan mekanisme atas diberikannya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI, termasuk urusan pada

bidang administrasi, politik dan ekonomi serta pengelolaan keuangan daerah. Pemberian otonomi daerah ditujukan untuk memicu kemandirian daerah dalam mengembangkan dan menggali sumber daya yang dimilikinya. Peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah merupakan tujuan utama pemberian wewenang kepada daerah otonom (Ardhini, 2011). Pengelolaan keuangan daerah seperti yang tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) didasarkan atas asas desentralisasi yang menjadi landasan bagi pemerintah pusat untuk menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah.

Struktur APBD yang memuat komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan ringkasan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk kapabilitas pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mencakup urusan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan yang dapat dilihat melalui dokumen APBD (Halim & Kusufi, 2007). Dalam hal pengukuran terhadap transparansi dan tanggung jawab atas pengelolaan APBD, penyusunan atas pertanggungjawaban keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diinstruksikan oleh pemerintah pusat (Nordiawan, 2018).

Melalui LKPD dapat diketahui sejauh mana kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangannya yang diukur dengan kinerja keuangan daerah. Kinerja dikenal juga dengan berbagai istilah seperti *performance*, prestasi kerja, produktivitas, *effort*, *job performance*, *proficiency merit*, inisiatif, loyalitas, moral kerja dan potensi kepemimpinan (Fauzi, 2020). Sejalan dengan pendapat tersebut, pencapaian dari target telah direncanakan oleh individu atau organisasi juga dikenal sebagai bentuk kinerja (Sularso & Restianto, 2011). Merujuk pada konteks pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik, maka dapat dipahami bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian atas rencana program dan kegiatan disertai dengan tingkat penyerapan anggaran selama satu tahun anggaran. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode untuk mengukur kinerja keuangan melalui APBD yang telah diterbitkan dan dilaksanakan (Halim & Kusufi, 2007). Dimensi kinerja keuangan termasuk derajat desentralisasi, rasio kemandirian daerah, ketergantungan keuangan, rasio keselarasan, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio pertumbuhan keuangan dan pemenuhan hutang (Sari et al., 2018). Pengukuran kinerja keuangan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan

penelaahan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menjabarkan kegiatan keuangan daerah sebagai bentuk representasi kepatuhan daerah terhadap APBD.

Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Laporan Keuangan Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur membagikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang (www.medcom.id). Predikat ini menandai bahwa Kota Malang telah mencapai opini WTP 10 kali berturut-turut. Kota Malang juga memperoleh penghargaan di ajang Indonesia Award 2020 kategori “Pemulihan Ekonomi Berbasis *E-Commerce*” karena kesuksesannya dalam memperbaiki perekonomian Kota Malang di era pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Malang selanjutnya termotivasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setelah menerima penghargaan tersebut (jatim.idntimes.com). Selain itu, Kota Malang menjadi destinasi wisata di Jawa Timur dengan potensi sumber daya yang dimilikinya. Potensi sumber daya inilah yang berkontribusi pada sumber pemasukan Kota Malang sebagaimana tertuang dalam LRA Kota Malang Tahun 2016-2020.

Proporsi pendapatan Kota Malang yang relatif serupa tiap tahunnya mencakup PAD, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Komponen Pendapatan Transfer terhadap total seluruh pendapatan daerah memperlihatkan rata-rata paling tinggi sebesar 70,18%, sedangkan rata-rata PAD sebesar 27,30%, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah sebesar 2,52%. Nilai rata-rata tersebut menggambarkan kecenderungan daerah yang bergantung pada dana transfer meliputi dana perimbangan, transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi masih sangat besar. Padahal pemerintah pusat telah membagikan wewenangnya kepada daerah untuk melakukan pemungutan baik berupa pajak dan retribusi daerah maupun sumber pendapatan lainnya dengan harapan otonomi daerah dapat berjalan lebih optimal. Kondisi demikian perlu dilakukan pengkajian mengingat potensi-potensi sumber daya yang terdapat di Kota Malang sebagai sumber PAD masih cukup besar dan berpeluang untuk digali lebih lanjut. Ketergantungan pemerintah Kota Malang terhadap dana transfer menjadikan keuangan daerah otonom sebagai objek krusial yang perlu untuk diteliti. Tujuan dilakukannya riset oleh peneliti yakni untuk mengukur dan menganalisis kinerja

keuangan Pemerintah Kota Malang periode Tahun 2016-2020 melalui rasio-rasio keuangan.

Pemilihan Kota Malang menjadi lokus penelitian yakni Pemerintah Kota Malang dalam periode 2016-2020 mendapatkan predikat WTP selama 10 kali berturut-turut yang merupakan predikat tertinggi dari BPK RI. Hal ini menjadi daya tarik penelitian karena selama periode tersebut banyak dinamika yang terjadi dan tentu akan berdampak pada realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun Pemerintah Kota Malang mampu mempertahankan opini WTP, sekali pun dalam pengelolaan keuangannya masih bergantung pada dana transfer. Penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang akuntansi sektor publik terutama akuntansi keuangan daerah, serta dapat dimanfaatkan sebagai khasanah literatur penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

APBD

Proses perencanaan keuangan organisasi yang dilakukan dengan merumuskan rencana kerja selama kurun waktu tertentu lazimnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter ialah definisi dari penganggaran (*budgeting*) (Mahsun, 2019). Pendapat sebelumnya menyebutkan bahwa anggaran berisi proyeksi rencana kegiatan yang akan dilakukan ke depan oleh organisasi (Permanasari, 2014). Merujuk pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, APBD berisi keseluruhan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah selama menjalankan kegiatan pemerintahannya.

LKPD

LKPD merupakan suatu media yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai media pertanggungjawaban kinerja keuangannya kepada publik (Kartoprawiro & Susanto, 2018). LKPD ini setiap tahunnya akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dengan disertai pemberian opini. Apabila opini yang diperoleh atas pemeriksaan LKPD berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah telah disajikan secara berkualitas dan wajar.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Definisi kinerja secara ringkas merupakan pencapaian dan tujuan organisasi, tingkat pencapaian visi dan misi organisasi, dan tingkat pencapaian pelaksanaan tugas-

tugas secara aktual (Maisyuri, 2017). Kinerja keuangan daerah pada prinsipnya merupakan kemampuan daerah untuk menemukan sumber penerimaan daerah dalam memenuhi keberlangsungan urusan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan sehingga tidak senantiasa bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, dan pemerintah daerah pun memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangannya sesuai peraturan yang berlaku (Syamsi dalam (Tarmizi et al., 2014). *Gap* antara target dan realisasi anggaran yang dicapai, efektivitas program, efisiensi biaya, serta pemerataan dan keadilan merupakan indikator yang sekurang-kurangnya dapat menilai kinerja (Puspitasari, 2012).

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Pembiayaan kegiatan pembangunan daerah melalui pemanfaatan PAD secara optimal menunjukkan tingkat kemampuan daerah atau disebut juga sebagai rasio derajat desentralisasi (Marlianita & Saleh, 2020). Pengukuran terhadap derajat desentralisasi dilakukan dengan menghitung PAD dengan dibandingkan total pendapatan yang tercantum dalam APBD).

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah melakukan pembiayaan atas pengeluaran daerah yang dilakukan dengan mengidentifikasi besarnya kontribusi PAD terhadap sumber dana dari eksternal pemerintah daerah merupakan definisi dari rasio kemandirian keuangan (Rante et al., 2018). Kemandirian daerah dihitung berdasarkan proporsi pendapatan asli dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer.

c. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Kapabilitas pemerintah daerah untuk melaksanakan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang disetujui disebut sebagai rasio efektivitas yang diukur berdasarkan potensi aktual daerah. Sementara itu, rasio efisiensi menguraikan tingkat kemampuan daerah melakukan perencanaan penerimaan daerah sesuai dengan azas disiplin sehingga tiap-tiap rincian belanja yang dikeluarkan dapat menghasilkan sisa anggaran (Suranta et al., 2017).

d. Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang berhubungan langsung dengan pemenuhan aktivitas pemerintah daerah, sementara belanja yang dikeluarkan

pemerintah daerah, namun tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dikenal sebagai belanja tidak langsung. Pengendalian biaya (*cost*) dan pengendalian anggaran (*budgetary*) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan rasio perhitungan belanja langsung dan tidak langsung (Hasanah & Vidiyastutik, 2018).

e. Rasio Pertumbuhan PAD, Pendapatan dan Belanja

Rasio pertumbuhan merupakan rasio untuk mengkaji kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan capaiannya pada setiap periode. Pengetahuan atas kinerja anggaran pemerintah daerah selama beberapa periode anggaran meliputi PAD, pendapatan daerah dan belanja daerah ke arah positif atau negatif merupakan manfaat dari penghitungan rasio pertumbuhan (Hariyanti et al., 2017).

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229).

Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif digunakan sebagai penjelasan mengenai fakta dan sifat populasi tertentu secara sistematis, akurat dan faktual (Yusuf, 2016). Secara umum, desain penelitian yang dilakukan secara deskriptif kuantitatif berdasarkan atas kesadaran yang sistematis dalam upaya menjawab permasalahan dengan menggunakan tahapan penelitian sesuai data-data kuantitatif yang tersedia.

Lokasi Penelitian

Penelitian berlokus pada Pemerintah Kota Malang tepatnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang sebagai penyedia data. Alasan penelitian ini menggunakan lokus Kota Malang yaitu kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur yang menjadikannya sebagai salah satu pusat perekonomian yang cukup berpengaruh di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, dalam periode tahun anggaran 2016-2020, Kota Malang memperoleh predikat WTP dari BPK RI. Prestasi ini tentu tidak mudah mengingat dengan kondisi wilayah Kota Malang yang

cukup luas dan banyaknya problematika yang terjadi, namun Pemerintah Daerah Kota Malang tetap mampu mempertahankan opini WTP.

Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan data dalam penelitian ini bersumber dari LRA yang termuat dalam LKPD Pemerintah Daerah Kota Malang. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dari situs resmi Pemerintah Daerah Kota Malang dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan referensi yang termuat dalam penelitian. Hasil pengumpulan studi literatur tersebut kemudian disusun, diolah, dianalisis dan disajikan dalam bentuk tulisan yang merangkum hasil penelitian.

Metode Analisis Data

Beberapa tahapan dalam melakukan analisis rasio keuangan, sebagai berikut:

1. Menghitung derajat desentralisasi dengan formulasi:

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah dengan formulasi:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \\ (\text{bantuan pusat atau provinsi dan pinjaman})$$

3. Menghitung rasio efektivitas dan efisiensi PAD dengan formulasi:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi PAD}}$$

4. Menghitung rasio belanja langsung dan tidak langsung dengan formulasi:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

5. Menghitung rasio pertumbuhan dengan formulasi:

$$\text{Rasio pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - 1}$$

$$\text{Rasio pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pertumbuhan Pendapatan } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - 1}$$

$$\text{Rasio pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi belanja } X_n - 1}$$

Keterangan: X_n = Tahun yang dihitung

X_{n-1} = Tahun sebelumnya

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum APBD dan PDRB Kota Malang

APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah mencakup unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Proses perumusan APBD yang melibatkan berbagai pihak dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti visi dan misi Kepala Daerah, aspirasi masyarakat, dan kondisi ekonomi. Pendapatan daerah Kota Malang tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp.2.187.985.479.986,- dan terendah pada tahun 2016 sebesar Rp.1.741.394.250.710,-. Belanja daerah tertinggi dikeluarkan Pemerintah Kota Malang pada tahun 2020 sebesar Rp.2.103.467.535.290,- dan terendah pada tahun 2017 sebesar Rp.1.813.923.922.302,-. Sementara itu, komponen pembiayaan pada APBD Kota Malang tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp.715.264.421.538,- dan terendah pada tahun 2017 sebesar Rp.242.605.705.627,-.

Selain data APBD Kota Malang, disajikan pula data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang Tahun 2016-2020 yang berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi ekonomi daerah berupa gambaran nilai tambah yang telah diperoleh unit-unit ekonomi di daerah tersebut (Habiburrahman, 2012). Sesuai data PDRB Atas Harga Berlaku, nilai tambah yang telah dihasilkan oleh unit-unit ekonomi atau dalam hal ini dikategorikan berdasarkan lapangan usaha, mengalami nilai yang cenderung meningkat dan mencapai posisi tertinggi pada tahun 2020 yakni sebesar 72.163,19. Kondisi ini cukup menarik mengingat pada tahun tersebut perekonomian Indonesia tengah berada pada situasi pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa struktur dan pertumbuhan ekonomi Kota Malang mengalami penguatan melalui pemanfaatan hasil-hasil lapangan usaha. Data ini juga mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, meskipun upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan PDRB tetap mutlak untuk dilakukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kota Malang cukup berhasil dalam menggali sumber daya daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil Analisa Data Rasio Keuangan

a. Derajat Desentralisasi

Melalui penghitungan rasio ini akan diperoleh derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Penghitungan nilai derajat desentralisasi dapat

didasarkan pada perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah. Hasil menemukan bahwa kontribusi PAD Kota Malang berada dibawah 30% dari total pendapatan, yang berarti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada transfer pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup tinggi meskipun derajat desentralisasi termasuk kriteria sedang. Oleh karena itu, nilai derajat desentralisasi yang cukup fluktuatif cenderung menurun dan persentase nilai pertumbuhan yang bergerak ke arah negatif terutama untuk tahun 2018 sebesar -8.5% dan tahun 2020 sebesar -6.57%. Pertumbuhan ke arah negatif ini juga menunjukkan bahwa jumlah PAD masih relatif kecil.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Penghitungan rasio kemandirian keuangan daerah didasarkan pada perbandingan antara jumlah PAD dengan total dana transfer yang mencakup bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta jaminan. Hasil menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Malang tahun 2016-2020 berada di bawah 50% atau dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan pola hubungan yang terbentuk adalah konsultatif yang berarti bahwa pemerintah daerah dinilai sedikit lebih mampu menjalankan otonomi daerah, meskipun di sisi lain pemerintah pusat masih memberikan intervensi melalui pemberian konsultasi. Rasio kemandirian paling rendah adalah pada tahun 2020 sebesar 36,5% yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada turunnya realisasi PAD. Penurunan realisasi PAD serta penurunan jumlah dana transfer menyebabkan persentase pertumbuhan cenderung menurun.

c. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan merupakan bentuk dari rasio efektivitas. Rasio efektivitas yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah semakin baik dan sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan turunnya kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD. Kemampuan merealisasikan PAD Pemerintah Kota Malang tahun 2016-2018 lebih baik dibandingkan tahun 2019-2020. Rasio efektivitas untuk tahun 2016-2018 termasuk kategori sangat efektif karena berada di atas 100% yakni berturut-turut 123,26%, 114,24% dan 105,43%, sedangkan untuk tahun 2019-2020 tergolong cukup efektif dengan rasio di bawah 100% yakni 95,92% dan 92,26%.

Kondisi ini disertai dengan penurunan persentase pertumbuhan dari tahun 2016 ke 2019 mulai dari 0,21% hingga -0,10%, kemudian 2020 kembali meningkat menjadi 0,33% yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah terlalu tinggi dalam menetapkan target PAD atau tidak mampu memprediksi tantangan ke depan yang berdampak pada realisasi PAD. Meski tidak signifikan, penurunan ini merupakan bukti bahwa pemerintah daerah mengalami kendala sehingga target PAD tidak tercapai.

Sementara itu, rasio efisiensi menunjukkan besaran biaya yang harus dikeluarkan suatu pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan itu sendiri. Rasio efisiensi penting untuk diketahui sebab setiap pemerintah daerah memiliki karakteristik yang berbeda, yang berarti bahwa biaya untuk pemerolehan PAD juga tidak akan sama pada tiap-tiap daerah. Melalui rasio efisiensi akan diketahui kemampuan suatu daerah yakni dengan estimasi biaya perolehan yang kecil ditargetkan mampu menghasilkan pendapatan yang optimal. Semakin tinggi tingkat rasio menunjukkan efisiensi PAD semakin rendah, sebaliknya semakin rendah tingkat rasio menunjukkan efisiensi PAD semakin tinggi.

Rasio efisiensi PAD Kota Malang semakin optimal setiap tahunnya, meskipun untuk tahun 2016-2017 sempat mengalami kontraksi tidak optimal, namun untuk tahun 2018-2020 relatif mengalami perubahan ke arah semakin efisien. Tingkat efisiensi tertinggi dicapai pada tahun 2019 yakni sebesar 4,22%. Hasil tersebut menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang mampu menekan biaya yang dikeluarkan untuk mengoptimalkan perolehan PAD. Secara garis besar, rata-rata rasio efisiensi berada dibawah 10% yang berarti bahwa Pemerintah Kota Malang telah sangat efisien dalam mengelola PAD.

d. Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Rasio ini sebagai gambaran komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi pendanaannya. Pengalokasian belanja langsung yang lebih besar diakibatkan oleh adanya pengaruh signifikan terhadap kualitas keluaran (*output*) kegiatan. Perbandingan belanja langsung terhadap total belanja relatif menunjukkan nilai rasio yang lebih besar dibandingkan persentase belanja tidak langsung terhadap total belanja. Belanja langsung menunjukkan rasio rata-rata di

atas 50% terkecuali pada tahun 2016 tercatat sebesar 45,25%, sedangkan rata-rata belanja tidak langsung berada di bawah 50% terkecuali tahun 2016 sebesar 54,75%. Data ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah lebih memprioritaskan alokasi pendanaan untuk digunakan membiayai kegiatan yang secara langsung berdampak pada kualitas keluaran (*output*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran (belanja) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang sesuai dengan fungsi anggaran yang dimaksudkan sebagai alat distribusi, stabilisasi dan alokasi.

e. Rasio Pertumbuhan PAD, Pendapatan dan Belanja

Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan persentase relisasi PAD riil pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan persentase total keseluruhan pendapatan pemerintah daerah setiap tahun. Sementara itu, rasio pertumbuhan belanja menunjukkan persentase pertumbuhan belanja pemerintah daerah yang termasuk didalamnya belanja langsung maupun tidak langsung. Rasio pertumbuhan paling tinggi yakni tahun 2017 baik pertumbuhan PAD maupun total pendapatan, sedangkan rasio paling rendah untuk pertumbuhan PAD terjadi pada tahun 2020 yakni -16,47%, dengan disertai rasio total pendapatan sebesar -10,6%. Penurunan total pendapatan dipengaruhi oleh turunnya beberapa sumber pendapatan dalam komponen total pendapatan meliputi PAD dan pendapatan transfer (dana perimbangan, transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi). Berbeda halnya dengan rasio pertumbuhan PAD dan total pendapatan yang mengalami penurunan, rasio belanja mengalami peningkatan pada tahun 2020 yakni sebesar 10,14%. Kondisi yang fluktuatif tersebut terindikasi akibat dari adanya pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah Kota Malang mengalami penurunan pendapatan dan dituntut untuk mengalokasikan belanja dalam rangka mendukung fokus penanganan dan pencegahan Covid-19.

Rangkuman Kinerja Keuangan Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020

Rata-rata rasio dejarat desentralisasi Kota Malang pada periode ini sebesar 27,31%, yang berarti bahwa proporsi PAD masih relatif lebih kecil dari total penerimaan daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Sementara itu, rata-rata rasio kemandirian daerah memiliki nilai 38,9% yang menunjukkan pola

hubungan konsultatif, sehingga pemerintah daerah dinilai sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini juga menjelaskan ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah yang masih cukup tinggi. Rata-rata rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan nilai masih cukup baik yakni secara berturut-turut sebesar 106,22% dan 6,83% atau termasuk dalam kriteria sangat efektif dan sangat efisien. Selain itu, rata-rata rasio belanja tidak langsung sebesar 46,6% atau lebih kecil dari rata-rata rasio belanja langsung sebesar 53,4% yang mencerminkan prioritas pendanaan Pemerintah Kota Malang mengarah pada kegiatan yang secara langsung berdampak pada kualitas keluaran (*output*).

KESIMPULAN

Hasil analisa kinerja keuangan Kota Malang menggambarkan rasio nilai yang beragam. Derajat desentralisasi Kota Malang berdasarkan kriteria derajat desentralisasi menunjukkan kriteria sedang dengan jumlah PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan. Kemandirian Kota Malang berada di bawah 50% atau dalam kategori rendah. Sementara itu, tingkat ketergantungan Kota Malang terhadap transfer pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup tinggi. Realisasi penerimaan PAD Kota Malang termasuk dalam kategori sangat efektif dibuktikan dengan rasio yang melebihi nilai 100%, dengan disertai biaya pemerolehan PAD tersebut yang tergolong dalam kategori sangat efisien. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Malang cukup optimal menggali sumber-sumber PAD yang tersedia. Sementara itu, rasio belanja langsung menunjukkan rata-rata yang lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung sehingga tercermin bahwa Pemerintah Kota Malang lebih memprioritaskan pendanaannya untuk kepentingan masyarakat.

Memperhatikan hasil analisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan, antara lain:

1. Tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Malang dapat diturunkan dengan mengoptimalkan potensi PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
2. Peningkatan pendapatan juga dapat dilakukan melalui perbaikan fasilitas pelayanan publik sehingga memudahkan perizinan bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Malang.

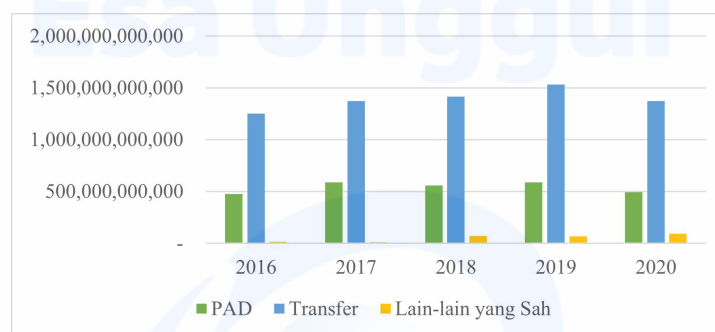
3. Melakukan optimalisasi terhadap belanja daerah yang diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini. (2011). *"Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)"*. Semarang: Universitas Diponegoro. Skripsi.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2021. *"Kota Malang Dalam Angka Tahun 2021"*. BPKAD Kota Malang. *"Laporan Realisasi Anggaran Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020"*.
- Fauzi, A. (2020). *"Manajemen Kinerja"*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Habiburrahman, H. (2012). *"Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung"*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Bandar Lampung, 3(1), 112723.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *"Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah"*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariyanti, D., Marheni, & Yenfi. (2017). *"Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2010-2015"*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan STIE-IBEK, 10 (November), 48–59.
- Hasan, Pupung Puad. (2017). *"Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat)"*. Jurnal Wacana Kinerja, Vol.17, Edisi 2.
- Hasanah, N., & Vidiyastutik, E. D. (2018). *"Analisis Kinerja Realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo"*. Jurnal Ecobuss, 6 (September), 26–35.
- Kartika, D., & Kusuma, I. (2015). *"Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi"*. Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Vol. 1 No. 2.
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). *"Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas"*. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, 16(1), 1–14.
- Mahsun, M. (2019). *"Konsep Dasar Penganggaran: Penganggaran Sektor Publik"*. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/ekap4403-penganggaran-sektor-publik/#tab-id-3>
- Maisyuri. (2017). *"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe"*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(1), 51.
- Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). *"Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat"*. Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 25–35.
- Nordiawan, D. (2018). *"Akuntansi Pemerintahan"*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permanasari, I. (2014). *"Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Penekanan Anggaran, Locus Of Control, dan Kohesivitas Kelompok Terhadap Timbulnya Kesenjangan Anggaran Pada SKPD Pemerintah Provinsi Riau"*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 1(2), 1–15.

- Puspitasari, A. F. (2012). *"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011"*. Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2018). *"Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. Inovasi"*, 13(2), 92.
- Republik Indonesia. 2014. *"Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah"*.
- Republik Indonesia. 2010. *"Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan"*.
- Sari, R. P., Tjahjono, H., & Turino. (2018). *"Analysis of Financial Performance in Public Sector (A Case Study in Lamongan, East Java-Indonesia)"*. JASF Journal of Accounting and Strategic Finance, 1(1), 82–90.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). *"Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah"*. Media Riset Akuntansi, Vol. 1.
- Suranta, S., Perdana, H. D., & Syafiqurrahman, M. (2017). *"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan"*. Jurnal Akuntansi, 5(2), 111–124.
- Tarmizi, R., Khairudin, K., & Jayadi, A. (2014). *"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Setelah Memperoleh Opini WTP"*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2).
- Yusuf, A. M. (2016). *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan"*. Prenada Media.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GRAFIK DAN TABEL



Grafik 1. Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020
Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2016-2020 (data diolah, 2021)

Tabel 1. Kriteria derajat desentralisasi

Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,10 – 20,00	Kurang
20,10 – 30,00	Sedang
30,10 – 40,00	Cukup
40,10 – 50,00	Baik
Di atas 50,00	Sangat Baik

Sumber: Litbang Depdagri (1991) (dalam Hasan, 2014)

Tabel 2. Pola Hubungan kemandirian keuangan daerah

Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0-25	Rendah Sekali	Instruktif
25-50	Rendah	Konsultatif
50-75	Sedang	Partisipatif
75-100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim dalam (Kartika & Kusuma, 2015)

Tabel 3. Nilai efektivitas PAD

Kriteria	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	<75

Sumber: Halim dalam (Kartika & Kusuma, 2015)

Tabel 4. Nilai efisiensi PAD

Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi (%)
Sangat Efisien	<10
Efisien	10-20
Cukup Efisien	21-30
Kurang Efisien	31-40
Tidak Efisien	>40

Sumber: Mahmudi dalam (Kartika & Kusuma, 2015)

Tabel 5. APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020

Komponen APBD/Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	1.741.394.250.710	1.971.916.657.660	2.040.194.240.907	2.187.985.479.986	1.956.089.185.104
PAD	477.541.556.465	588.276.962.084	556.888.383.144	588.066.042.351	491.189.243.955
Pendapatan Transfer	1.251.246.694.245	1.373.334.695.576	1.414.488.577.763	1.532.844.037.635	1.374.144.565.833
-Dana Perimbangan	1.069.366.446.979	1.174.719.580.753	1.181.289.819.588	1.203.245.896.321	1.098.463.668.428
-Transfer Pusat	5.000.000.000	7.500.000.000	25.500.000.000	73.871.078.000	73.440.909.000
-Transfer Pemprov	176.880.247.266	191.115.114.823	207.698.758.175	255.727.063.314	202.239.988.405
Lain-lain yang sah	12.606.000.000	10.305.000.000	68.817.280.000	67.075.400.000	90.755.375.316
Belanja	1.710.077.444.260	1.813.923.922.302	1.925.070.651.869	1.909.775.302.319	2.103.467.535.290
Belanja Operasi	1.515.999.562.534	1.473.423.083.085	1.573.833.302.430	1.669.892.391.900	1.685.625.501.299
Belanja Modal	193.667.164.391	340.494.355.167	351.203.268.897	238.525.539.355	363.227.224.640
Belanja Tak Terduga	331.951.135	-	34.080.542	1.357.371.065	54.614.809.352
Transfer (bagi hasil)	78.766.200	6.484.050	-	-	-
Pembiayaan	273.688.899.177	242.605.705.627	374.399.444.579	464.554.243.871	715.264.421.538
Penerimaan Pembiayaan	316.838.899.177	305.005.705.627	400.598.440.986	489.359.571.730	742.764.421.538
Pengeluaran Pembiayaan	43.150.000.000	62.400.000.000	26.198.996.407	24.805.327.859	27.500.000.000
SILPA	305.005.705.627	400.598.440.986	489.523.033.617	742.764.421.538	567.886.071.352

Sumber: LRA Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020, data diolah (2021)

Tabel 6. PDRB Kota Malang Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

No	Tahun	PDRB Atas Harga Berlaku	PDRB Atas Harga Konstan
1	2016	57.170,60	44.303,90
2	2017	62.089,30	46.824,75
3	2018	67.696,35	49.500,83
4	2019	72.764,21	52.334,75
5	2020	72.163,19	51.154,53

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2021, data diolah (2021)

Tabel 7. Derajat desentralisasi Kota Malang Tahun Tahun 2016-2020

Tahun	Derajat Desentralisasi (%)	Kriteria	Pertumbuhan (%)
2015	23,23		
2016	27,42	Sedang	18,04
2017	29,83	Sedang	8,79
2018	27,30	Sedang	-8,50
2019	26,88	Sedang	-1,53
2020	25,11	Sedang	-6,57

Sumber: LRA Kota Malang, data diolah (2021)



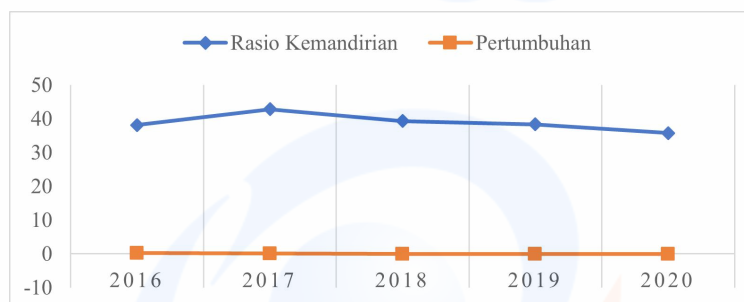
Grafik 2. Derajat Desentralisasi

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2016-2020 (data diolah, 2021)

Tabel 8. Rasio kemandirian Kota Malang Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan	Pertumbuhan (%)
2015	30,59	Rendah	Konsultatif	
2016	38,17	Rendah	Konsultatif	0,25
2017	42,84	Rendah	Konsultatif	0,12
2018	39,37	Rendah	Konsultatif	-0,08
2019	38,36	Rendah	Konsultatif	-0,03
2020	35,75	Rendah	Konsultatif	-0,07

Sumber: LRA Kota Malang, data diolah (2021)



Grafik 3. Rasio Kemandirian

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2016-2020 (data diolah, 2021)

Tabel 9. Rasio efektivitas PAD Kota Malang Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Efektivitas PAD (%)	Kemampuan Keuangan	Pertumbuhan (%)
2015	116,75	Sangat Efektif	
2016	123,26	Sangat Efektif	0,06
2017	114,24	Sangat Efektif	-0,07
2018	105,43	Sangat Efektif	-0,08
2019	95,92	Cukup Efektif	-0,09
2020	92,26	Cukup Efektif	-0,04

Sumber: LRA Kota Malang, data diolah (2021)



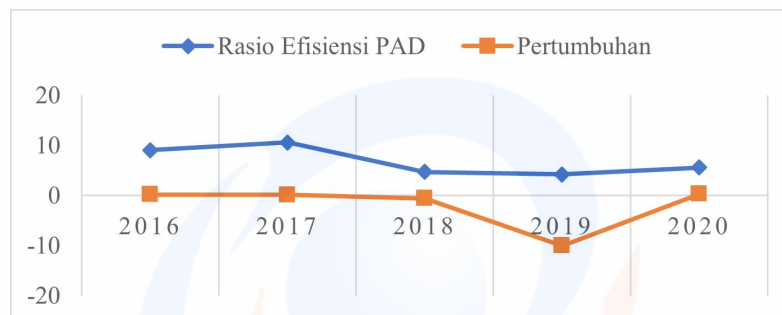
Grafik 4. Rasio Efektivitas PAD

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2016-2020 (data diolah, 2021)

Tabel 10. Rasio efisiensi PAD Kota Malang Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Efisiensi PAD (%)	Kemampuan Keuangan	Pertumbuhan (%)
2015	7,48	Sangat Efisien	
2016	9,04	Sangat Efisien	0,21
2017	10,61	Efisien	0,17
2018	4,70	Sangat Efisien	-0,56
2019	4,22	Sangat Efisien	-0,10
2020	5,60	Sangat Efisien	0,33

Sumber: LRA Kota Malang, data diolah (2021)



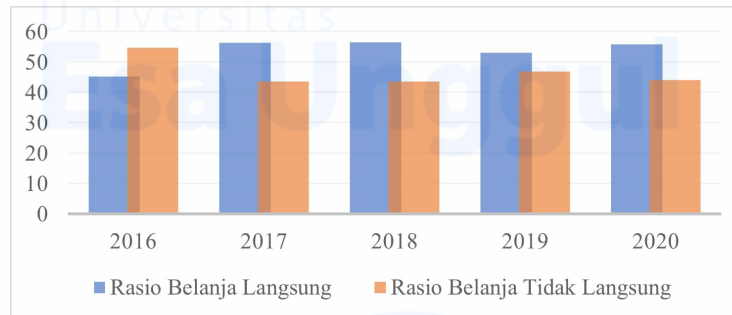
Grafik 5. Rasio Efisiensi PAD

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2016-2020 (data diolah, 2021)

Tabel 11. Rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung Kota Malang Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Belanja Langsung (%)	Rasio Belanja Tidak Langsung (%)
2016	45,25	54,75
2017	56,36	43,64
2018	56,41	43,59
2019	53,12	46,88
2020	55,87	44,13

Sumber: LRA Kota Malang, data diolah (2021)

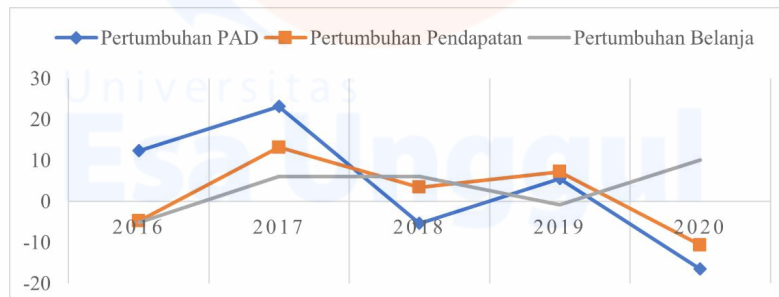


Grafik 6. Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2016-2020 (data diolah, 2021)

Tabel 12. Rasio pertumbuhan PAD, pendapatan dan belanja Kota Malang Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Pertumbuhan PAD	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Rasio Pertumbuhan Belanja
2016	12,38	-4,79	-5,18
2017	23,19	13,24	6,07
2018	-5,34	3,46	6,13
2019	5,60	7,24	-0,79
2020	-16,47	-10,60	10,14

Sumber: LRA Kota Malang, data diolah (2021)



Grafik 7. Rasio Pertumbuhan
Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2016-2020 (data diolah, 2021)

Tabel 13. Rangkuman rasio keuangan Kota Malang Tahun 2016-2020

Rasio	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata (%)
Derajat Desentralisasi	27,42	29,83	27,30	26,88	25,11	27,31
Kemandirian Daerah	38,17	42,84	39,37	38,36	35,75	38,90
Efektivitas PAD	123,26	114,24	105,43	95,92	92,26	106,22
Efisiensi PAD	9,04	10,61	4,70	4,22	5,60	6,83
Aktivitas:						
Belanja Tidak Langsung	54,75	43,64	43,59	46,88	44,13	46,60
Belanja Langsung	45,25	56,36	56,41	53,12	55,87	53,40
Pertumbuhan:						
PAD	12,38	23,19	-5,34	5,60	-16,47	3,87
Pendapatan	-4,79	13,24	3,46	7,24	-10,60	1,71
Belanja	-5,18	6,07	6,13	-0,79	10,14	3,27

Sumber: LRA Kota Malang, data diolah (2021)